

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	
			Meningkatnya Pengelolaan Aset daerah	Persentase Pengelolaan aset OPD	
			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah	
			Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Akip Badan Pengelola Keuangan Daerah	

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
- Isu Gender Strategis: Masih terdapat kesenjangan akses masyarakat, khususnya perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat yang bekerja pada jam kerja, dalam memperoleh layanan pembayaran pajak daerah sehingga partisipasi pembayaran pajak belum optimal. - Kesenjangan APKM (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat) laki-laki dan perempuan di sektor tersebut ▫ Akses: Perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah yang jauh memiliki akses pelayanan yang lebih terbatas. ▫ Partisipasi: Partisipasi pembayaran pajak kelompok tersebut lebih rendah karena keterbatasan waktu dan mobilitas.	- Ranah Masyarakat: • Perempuan memiliki beban domestik sehingga sulit datang ke kantor pelayanan. • Masyarakat di wilayah pinggiran memiliki keterbatasan transportasi. • Masyarakat yang bekerja pada jam kantor sulit meninggalkan pekerjaan. • Penyandang disabilitas dan lansia mengalami hambatan mobilitas. - Ranah Pemerintah: • Titik layanan pembayaran masih terpusat di kantor. • Jadwal pelayanan belum mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan. • Sarana pelayanan keliling belum optimal. • Informasi jadwal pelayanan belum menjangkau seluruh masyarakat.	1. Menyediakan dan memelihara kendaraan operasional mobil pajak keliling. 2. Menyusun jadwal dan lokasi pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan akses perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat pekerja. 3. Melaksanakan sosialisasi jadwal pelayanan melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat. 4. Menempatkan mobil pajak keliling di lokasi strategis seperti pasar, pusat pelayanan publik, kawasan permukiman, dan pusat keramaian. 5. Melakukan evaluasi berkala terhadap jangkauan pelayanan berdasarkan data penerima layanan laki-laki dan perempuan. 6. Meningkatkan kapasitas	- • Badan Pengelola Keuangan Daerah (leading sector). • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. • Dinas Komunikasi dan Informatika. • Kecamatan dan Kelurahan. • Satuan Polisi Pamong Praja (bila diperlukan untuk mendukung kegiatan pelayanan di lapangan).

Kontrol: Masyarakat belum memiliki banyak pilihan lokasi dan waktu pelayanan yang sesuai kebutuhannya. ▣ Manfaat: Manfaat pelayanan pajak belum dirasakan secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat. ○ Bentuk-bentuk ketidakadilan gender (beban ganda, stereotip, subordinasi, marginalisasi, kekerasan berbasis gender)	Akar Masalah: Pelayanan pembayaran pajak belum sepenuhnya memperhatikan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan.	petugas mengenai pelayanan publik yang responsif gender dan ramah disabilitas.	
--	--	---	--

3. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
- Menyediakan dan memelihara kendaraan operasional mobil pajak keliling agar pelayanan pembayaran pajak dapat menjangkau masyarakat baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok rentan dan wilayah yang jauh dari pusat pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah

- Menyusun jadwal operasional dan lokasi pelayanan mobil pajak keliling berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan akses yang mudah bagi perempuan, lansia, penyandang disabilitas serta masyarakat yang bekerja pada jam kantor - Melakukan pemeliharaan kendaraan operasional secara berkala untuk memastikan pelayanan mobil pajak keliling berjalan aman, nyaman, berkesinambungan dan dapat memberikan akses pelayanan kepada yang setara kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi gender				
---	--	--	--	--

Padang Panjang, Juni 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 19811026 200802 1 001